

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA TOGUBANG DAN DESA TEGAR PRIYAH KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN

Maulidia Hidayati¹, Yaqub Cikusin², Retno Wulan Sekarsasi³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: maulidyahidayati20@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Program PKH untuk Mengentaskan Kemiskinan di Di Desa Togubang Dan Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Program PKH digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, serta untuk mengetahui apakah bantuan PKH tetap diberikan atau tidak dan faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pemanfaatannya. Pemeriksaan ini diarahkan dengan menggunakan teknik eksplorasi subyektif grafis. Hasil pemeriksaan menunjukkan 1) PKH untuk mengatasi kemiskinan di Desa Togubang Dan Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. telah berjalan dengan baik karena telah memenuhi faktor-faktor yang dianut oleh penanda-penanda yang digunakan peneliti dalam mendalami pelaksanaan strategi (PKH) untuk memberantas kemiskinan Di Desa Togubang Dan Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang dikonsentrasikan melalui spekulasi model pelaksanaan sistem Van Mater dan Van Horn (Tacjhan, 2006), 2) terdapat variabel pendorong seperti Sumber daya, karakteristik peran pendamping dan keadaan sosial ekonomi, sedangkan unsur penghambat terdapat pada tidak sinkronnya informasi kependudukan dan wilayah penerima manfaat PKH yang sulit dijangkau, 3) kelayakan Program Kepercayaan Keluarga (PKH) dinilai dengan menggunakan 4 pedoman dari (Budiani, 2007:53) yaitu ketepatan tujuan, sosialisasi program, sasaran dan pengawasan program. Yang mana dari keempat penanda tersebut bisa dikatakan belum terpenuhi, sehingga dinilai PKH belum benar-benar siap memusnahkan kemiskinan 100 persen di Kabupaten bangkalan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Pendahuluan

Salah satu problem yang sebenarnya diperhatikan bagi Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang membingungkan dan berlapis-lapis sehingga memerlukan perbaikan. Salah satu penyebab permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah tingginya keunikan antar kabupaten dan perkumpulan masyarakat, karena tidak konsistennya penyampaian gaji, sehingga kesenjangan klasifikasi sosial di Indonesia semakin membesar. Pemerintah sendiri pada umumnya merancang upaya untuk memberantas kemelaratan, yakni dengan menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sesuai dengan pendahuluan UUD 1945, dimana untuk menggarap bantuan pemerintah terhadap masyarakat dalam berbagai sudut pandang, otoritas publik membuat pengaturan sebagai program bantuan sosial

Program PKH merupakan program pemberian bantuan sosial krisis kepada keluarga sangat tidak mampu yang dimulai sekitar tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai

kepada keluarga sangat tidak mampu mengingat kesepahaman yang baru saja diselesaikan. Program yang dikelola pemerintah yang didukung pemerintah ini diberikan melalui kemungkinan *Cinditional Cash Transfers* (CCT) dan dipandang sangat berharga dalam mengatasi kemiskinan yang dirasakan oleh berbagai negara, khususnya masalah kemiskinan yang terus berlanjut ([https://pkh.kemsos.go. ID](https://pkh.kemsos.go.id), 2019). Inti dari Program Perwalian Keluarga (PKH) adalah membantu menghilangkan kemiskinan dengan mengupayakan sifat SDM pada kelompok yang sangat miskin.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti menjatuhkan pilihan di Desa Togubeng Kecamatan Geger dengan alasan bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Desa Togubang merupakan desa paling banyak menerima bantuan PKH di Kecamatan Geger. Dari prapenelitian yang dilakukan peneliti di temukan bahwa masih terjadi kesenjangan yang terjadi pada peorlehan data penelitian ialah dimana dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar

Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan masih terdapat kendala dalam ketidak sinkronan data kependudukan yang dilaporkan dari pusat dengan data kependudukan dari desa. Sehingga berdampak pada ketidak tepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan, kemudian, lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana daerah jangkauannya membutuhkan waktu tempuh yang lama yaitu sekitar 1 jam perjalanan ditambah lagi dengan medan jalan yang rusak dan yang terakhir ialah ketidak tersediaan sarana dan prasarana dalam P2K2. Mengingat PKH merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh otoritas publik, maka penting untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan tambahan program yang telah dijalankan selama ini di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Sehingga dilihat pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka peneliti terkesan untuk menelisik tentang subjek ini dan dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?
3. Apakah sudah efektif atau tidak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan dan peningkatan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Membedah bagaimana implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk Untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
3. Untuk Membedah keberlangsungan efektifitas pada Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini dapat membuka informasi, khususnya tentang pelaksanaan PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan dapat dijadikan sumber perspektif dalam eksplorasi lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi teknik agar para peneliti lebih memahami pelaksanaan (PKH) untuk mengurangi kemiskinan.
- b. Konsekuensi dari peninjauan ini dapat memberikan kontribusi kepada para kepala administrasi sosial dan pendamping Pkh dalam menanggulangi kemiskinan.
- c. Pendalaman ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian lebih lanjut terkait PKH untuk menanggulangi kemiskinan menurut sudut pandang alternatif. Oleh karena itu, terdapat berbagai pembicaraan perbaikan serta penemuan di lapangan yang dapat membangun hipotesis lain.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Implementasi, Sesuai dengan penuturan dari (Mulyadi, 2015) implementasi mengacu pada serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan. Implementasi mampu mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi model utilitarian dan upaya untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang masih belum diketahui oleh Horn (Tahir, 2014: 55) “mengartikan implementasi sebagai tindakantindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufiqurakhman, 2014) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Model implementasi kebijakan Van Mater dan Van Horn (1975:462) dalam (Tachjan, 2006:21) menyatakan bawa implementasi kebijakan ialah sebagian unsur yang ada pada tahapan kegiatan ataupun mekanisme kebijakan publik. Beberapa variabel yang berdampak

implementasi kebijakan publik adalah variabel :

- a) Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik agen pelaksana
- a) Komunikasi antar organisasi Pelaksana
- d) Sikap Para Pelaksana
- e) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

kemudian fektivitas implementasi E. Mulyasa (2004) dalam (Tampubolon, 2020:17) merupakan Keselarasan antara individu yang melakukan usaha dan tujuan yang diharapkan, jadi secara keseluruhan, efektivitas adalah cara yang digunakan suatu asosiasi dalam memperoleh dan menggunakan aset dengan tujuan akhir demi ketercapaian tujuan fungsional.

2. Program Keluarga Harapan, Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga harapan adalah adalah program pemberian bantuan sosial kontingen kepada keluarga miskin dan rentan serta jaringan yang tercaanang dan terorganisir, ditangani oleh Badan Publik Bantuan Data pemerintah dan ditentukan sebagai kelompok sasaran PKH, PKH adalah program pemberian bantuan berupa uang kepada RTSM. Oleh karena itu, RTSM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan upaya untuk menghilangkan gagasan SDM, khususnya bidang edukasi dan bantuan pemerintah. Secara umum tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, menggarap SDM, dan memberikan dampak yang berarti terhadap cara pelaksanaan RTSM yang kurang kuat dalam menumbuhkan bantuan pemerintah selanjutnya (Departemen Sosial RI, 2009).
3. Kemiskinan, Berbagai gagasan tentang kemiskinan telah tercipta, menurut (Effendy, 1993) kemiskinan dapat dikenali dari aspek sosial, aspek finansial, dan aspek politik. Pendetailan gagasan tentang kemiskinan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut, sehingga dikenal dengan istilah kemiskinan sosial atau kemiskinan kebudayaan, kemiskinan ekonomi dan kemiskinan politik. Sedangkan (Siagian, 2012:2) memahami persoalan kemiskinan dengan mengusung kepentingan untuk memahami persoalan kemiskinan dari dua sudut pandang yang berbeda, khususnya kemiskinan sebagai suatu kondisi dan kebutuhan sebagai sebuah siklus. Sedangkan menurut

Kurniawan dalam (Khosman, dkk., 2015: 1) kemiskinan adalah suatu titik dimana gaji suatu daerah berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Kebutuhan juga menyiratkan tidak adanya kebutuhan sosial, termasuk larangan sosial, ketergantungan, dan ketidakberdayaan untuk mengambil bagian dalam kehidupan yang terhormat di mata publik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam ini, diterapkan semacam pemeriksaan terstruktur dengan metodologi deskriptif kualitatif hal ini berguna untuk mencatat suatu permasalahan dari atas ke bawah dalam setting yang berkaitan dengan waktu dan keadaan. Metode ini dilakukan dengan felsibel dan alamiah sesuai dengan ketentuan pasal di lapangan. Bogdan dan Taylor (1975:5) mengkarakterisasi strategi subjektif sebagai metode kualitatif yang menyampaikan data yang jelas, misalnya, kata-kata yang dibuat atau dikomunikasikan secara verbal dari orang-orang dan pendekatan tindakan yang alami. (Kirk dan Mill, 1986: 9) menggambarkan eksplorasi kualitatif sebagai praktik luar biasa dalam ilmu sosial yang dari perspektif keseluruhan bergantung pada pemahaman individu baik dalam ruang maupun dalam cara yang terdengar paling alami bagi mereka.

Dari beberapa sentimen di atas, mungkin bisa beralasan bahwa metode kualitatif adalah metode mengamati tingkah atau perilaku seseorang atau kelompok yang bersifat alamiah yang menjelaskan suatu fenomena pada waktu tertentu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi penelitian dalam penelitian dengan tujuan agar percakapan lebih tersusun. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan terhadap Implementasi dari PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan berdasarkan teori Model Implementasi Van Meter dan Van Horn ialah :
2. Memfokuskan terhadap faktor pendukung dan penghambat PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
 - a. Faktor pendukung Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan :
 - b. (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan :

3. Memfokuskan terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan berdasarkan (Budiani, 2007:53) yakni : ketepatan tujuan, sosialisasi program, sasaran dan pengawasan program.

Lokasi Penelitian

Peneliti menentukan area eksplorasi sebagai tempat pemeriksaan serta penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupten Bangkalan. Penentuan wilayah ini didasarkan pada pemikiran bahwa Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Desa dengan penerima PKH terbesar.

Jenis dan Sumber Data

Informasi yang akan dihimpun melalui pendalaman ini adalah informasi yang sesuai dengan konsentrat pemeriksaan, khususnya Analisis Implemetasi Kebijakan PKH untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

Seperti yang ditunjukkan oleh Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy. J. Moleong mengungkapkan, data yang penting dalam eksplorasi kualitatif adalah kata-kata dan latihan, selebihnya data tambahan seperti laporan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada segmen ini data secara jelas dipisahkan menjadi kata-kata dan latihan, yang terdiri dari sumber data, foto, dan estimasi (Moleong, 2000).

2. Data Sekunder

Data sekunder data adalah data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau dikelola oleh berbagai lembaga, seperti kronik (Moleong, 2000). Informasi tambahan berupa data yang diperoleh dari sumber pengetahuan dan sumber-sumber lain mulai dari surat-surat individual, jurnal, hingga catatan-catatan yang sebenarnya. Informasi tambahan juga dapat berupa majalah, pemberitahuan, distribusi dari berbagai asosiasi, fokus pada hasil, teori, hasil tinjauan, penyelidikan yang dapat diverifikasi, dll.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data informasi tersebut, pembuatnya langsung mendatangi objek pemeriksaan untuk mendapatkan informasi penting, sehingga teknik pengumpulan data menggunakan strategi berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metodologi untuk mengumpulkan data melalui pertemuan dekat dan pribadi melalui perdagangan dan pertanyaan serta balasan dengan sumber. Wawancara merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lugas dari sumbernya (Sudaryono, 2019). Wawancara diarahkan oleh analis untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada individu aset, dan individu aset juga memberikan jawaban secara lisan. Peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah buku, pulpen dan telepon genggam. Ada 3 narasumber yakni koordinator PKH, Kepala Desa, dan Masyarakat Penerima PKH.

b. Observasi

Observasi adalah persepsi yang teratur dan pencatatan kekhasan yang dipertimbangkan (Usman, 1996). Observasi adalah sistem pengumpulan data yang mengantisipasi bahwa peneliti harus terjun ke lapangan dengan keyakinan untuk fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan ruang, tempat, hiburan, latihan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan terkait dengan penyelidikan yang telah selesai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu atau faktor-faktor seperti catatan, catatan, buku, kertas, majalah, prasasti, notulensi , rencana, dan sebagainya (Arikunto, 2003). Dokumentasi dalam penilaian ini adalah kenyataan-kenyataan terkini dan data-data yang disimpan dalam bentuk dokumentasi, surat-surat, catatan-catatan, laporan-laporan atau catatan-catatan yang sifat-sifat pokoknya tidak terbatas pada kenyataan yang ada, sehingga memberikan pintu terbuka kepada para ahli untuk mengetahui hal-hal yang telah terjadi sebelumnya.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data. Hal ini agar dengan memanfaatkan alat ini informasi dapat dikumpulkan. Menurut Suryabrata, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mencatat keadaan atau latihan penelitian. Untuk keadaan sekarang ini, alat yang digunakan untuk mencatat keadaan atau mengumpulkan informasi adalah gambaran umum, pola pemahaman, pencatatan langsung dengan sumber, dan rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pencatatan informasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan dalam eksplorasi ini merupakan teknik subjektif grafis, karena data yang diperoleh merupakan informasi sebagai penggambaran. Berdasarkan informasi tersebut, peneliti menggunakan strategi penilaian data menurut Miles dan Huberman, ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam menggambarkan data penyelidikan, yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah apa yang terjadi harus sesuai untuk menunjukkan nilai sebenarnya, memberikan dasar pemikiran untuk diterapkan dan pilihan luar dapat dibuat mengenai konsistensi tekniknya dan ketidakberpihakan penemuan dan pilihannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang disajikan oleh peneliti meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2012).

Pembahasan

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Tobubang dan Desa Tegar Priyah yang dikaji menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn ialah sebagai berikut :

1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan

Salah satu faktor yang menentukan kemajuan pelaksanaan implementasi kebijakan publik adalah ukuran dan fokus pendekatan, dimana ukuran dan sasaran seharusnya mempunyai pilihan untuk mengatur pelaksanaan implementasi sesuai dengan standar yang disusun. Dalam pelaksanaan Program (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Gegeger Kabupaten Bangkalan menemukan bahwa para ahli pelaksana pendekatan mempunyai norma atau langkah strategi yang dilakukan melalui Pedoman Bantuan Program (PKH) tahun 2022. serta instrumen penyaluran bantuan PKH kepada penerima manfaat PKH. Selain itu, tujuan dilaksanakannya Program (PKH) adalah untuk mengatasi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Gegeger Kabupaten Bangkalan cenderung menjadi cara pemerintah untuk mengakui keberhasilan dan mengurangi kemiskinan. tarif untuk seluruh area lokal kota. Bangkalan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan (PKH) untuk

memberantas kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Gegeger Kabupaten Bangkalan telah dilakukan sesuai SOP dan target yang telah dibuat, dimana inti dari PKH Programnya adalah untuk meningkatkan kepuasan pribadi kelompok masyarakat KPM, terus menurunkan konsumsi berat badan dan membantu meningkatkan gaji KPM dan mengurangi kemiskinan. Dari catatan narasumber yang mendapat PKH, PKH ini sudah membantu memenuhi atau menutup kebutuhan mereka. Muali dari kebutuhan pokok sampai biaya sekolah anak – anak penerima PKH.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan bagian yang dapat memberikan keuntungan bagi eksekusi strategi agar berjalan sesuai harapan. Dalam perspektif Van Mater dan Van Horn (Riant Nugroho, 2003: 165) mereka mengatakan bahwa hasil dari proses pelaksanaan pendekatan sangat bergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang dapat diakses. Manusia merupakan aset utama dalam menentukan kemajuan suatu siklus implementasi. Pada pelaksanaan pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Tobubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, sumber daya manusia yang dienyam oleh Desa Tobubang dan Desa Tegar Priyah cenderung memiliki sumber daya yang sama dan tidak ada perbedaan mencolok diantaranya, perbedaan yang didapatkan hanya pada perbedaan jumlah pendamping PKH Desa Tobubang serta Desa Tegar Priyah, dimana desa Togubang memiliki 2 pendamping PKH sedangkan Desa Tegar Priyah hanya memiliki 1 pendamping PKH. Disamping itu kedua desa tersebut memiliki komponen sumber daya manusia yang sama dimana dalam kinerja pendamping PKH masing masing desa akan dibantu oleh staff desa, dan pengawas PKH. Namun Perbedaan ini akan menjadikan ketimpangan pekerjaan kurang maksimal untuk desa Tegar Priyah.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana ialah citra yang ditampilkan tiap pelaksana dan kemampuan para pendamping PKH diseleksi langsung melalui perekrutan yang diadan oleh Kementrian Sosial, para pendamping PKH diseleksi dan dipilih sesuai kriteria yang diinginkan oleh Kementrian Sosial sebelum terjun langsung kelapangan. Melihat proses perekrutan untuk memilih sumber daya pelaksana PKH yang unggul dapat disimpulkan bahwa

implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan telah memenuhi poin teori karakteristik agen pelaksana Van Meter dan Van Horn untuk menentukan kemampuan agen pelaksanaannya melalui tahap seleksi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.

4. Komunikasi antar Organisasi Terkait

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas sosial ialah dengan melaksanakan aktifitas pemahan informasi dengan baik tentang program PKH secara berkala melalui pertemuan langsung atau bisa disebut dengan sosialisasi. Pelaksanaan komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dengan para pendamping atau koordinator PKH dilakukan dengan intens dimana terjadi penyaluran informasi yang berkala dari para pendamping mengenai keluhan dan kritik dari masyarakat dalam proses penyaluran bantuan PKH yang kemudian akan ditelaah dan didiskusikan bersama. Selain itu jalinan komunikasi yang cukup bagus juga ditampakkan melalui merambah luasnya jalinan relasi antar Organisasi perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan yang melakukan kegiatan koordinasi p2k2 dengan mengusung pertemuan kelompok untuk mengedukasi masyarakat serta memberikan arahan mengenai kehidupan sosial yang turut serta melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan dalam menyalurkan serta mengedukasi masyarakat mengenai stunting bahwa pelaksanaan komunikasi. Menelisik lebih dalam komunikasi pelaksanaan PKH yang dilakukan oleh masing – masing pendamping PKH Desa Togubang dan Tegar Priyah memiliki perbedaan. Dimana Pendamping Desa Togubang melakukan komunikasi melalui sosialisasi P2K2 dengan masyarakat yang bisa dilakukan setiap adanya keluhan dan pengaduan yang dirasakan masyarakat, terlebih untuk sosialisasi pada umumnya pendamping desa Togubang melaksanakan sosialisasi secara rutin setiap bulannya melalui pertemuan kelompok dan sosialisasi melalui media komunikasi whatsapp. Sedangkan untuk komunikasi yang ditampakkan oleh pendamping PKH desa Tegar Priyah dilakukan dengan melakukan pertemuan kelompok yang dibagi menjadi beberapa dusung dengan pelaksanaan pertemuan 2 kali setiap bulannya. Menyikapi hal tersebut

dengan melihat duarsi waktu yang ditetapkan dalam pendampingan PKH desa Tegar Priyah yang hanya dilakukan sekali setiap bulannya juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang tersedia di desa Tegar priyah yang hanya memiliki 1 Pendamping PKH saja. Sehingga durasi komunikasi yang ditampakkan oleh Desa Tegar Priyah lebih sedikit dari pada Desa Togubang.

5. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksanaan mereka dalam melakukan pendampingan PKH berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dimana dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan memuat tentang tupoksi pendamping pkh yang terletak pada Bagian Ketujuh Pasal 49 tentang Pendampingan PKH, kemudian juga memuat tentang hak dan kewajiban peserta PKH yang ditulis pada BAB II Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam memberikan pemahaman hak dan kewajiban para PKH para pendamping PKH baik dari pendamping Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah dilakukan dengan telaten dan sabar, khususnya dalam berhadapan dengan lansia mereka akan melakukan sesi tanya jawab agar para penerima PKH dapat menyerap informasi yang disampaikan pendamping dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang dikulik dalam penelitian ini menampakkan sikap dari kelompok eksternal yang mana turut mendorong keberhasilan kinerja implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Jika kondisi kelompok eksternal kondusif maka keberhasilan implementasi PKH pun akan mencapai keberhasilan, hal ini di telaah melalui respon KMP dalam menerima program bantuan PKH, yang mana respon masyarakat terhadap implementasi pelaksanaan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan cukup baik. Dengan respon masyarakat desa Togubang dan Tegar Priyah yang positif akan dapat menilai bahwa program yang dijalankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adapun faktor pendukung dan

penghambat implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Toguang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ialah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Unsur pendukung implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Toguang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan disampaikan langsung oleh Bapak Fatoni selaku Koordinator/Pendamping PKH Desa Togubang dan Bapak Toha Selaku Koordinator/Pendamping PKH Desa Tegar Priyah. Dikatakan dalam pengimplementasian Program PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Toguang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan memiliki dua unsur pendukung yang mendorong keberhasilan program PKH. Itu sendiri dimana diantaranya ialah : Sumber daya finansial yang didapatkan masyarakat dari program bantuan PKH itu sendiri sehingga jika ditinjau dari segi finansial PKH ini dapat membantu menutupi kebutuhan perekonomian KPM Desa Tegar Priyah terutama pada KPM dengan kategori lansia. Kemudian faktor pendukung selanjutnya ialah karakteristik agen pelaksana pada peran pendamping, yang mana peran pendamping dalam keberlangsungan implementasi kebijakan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sangat penting adanya, sebab dengan adanya peran pendamping di dalam pelaksanaan program tersebut maka akan dapat membantu kelancaran dari Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya profesionalisme, sikap telaten dan sabar, ramah serta memiliki perhatian yang baik kepada masyarakat akan menjadikan pembangunan relasi yang baik antara Pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan. Dan yang terakhir ialah lingkungan sosial, ekonomi yang memiliki peningkatan yang signifikan yang mana dalam hal ini bantuan program bantuan PKH dirasa memiliki efek yang positif dalam ekonomi masyarakat desa Desa

Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan cukup terpenuhi dan terpenuhi untuk kebutuhan hidupnya. Meskipun peningkatan dalam kondisi sosial ekonomi tidak signifikan namun, PKH ini sangat membantu mencukupi kebutuhan mereka apalagi dengan keluarga yang memiliki anak usia sekolah.

b. Faktor Penghambat

Selanjutnya ialah faktor penghambat yang mana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan disampaikan oleh Bapak Suakrdi selaku Kepala Sub Bagian Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ketidak sinkronan data kependudukan yang dilaporkan dari pusat dengan data kependudukan dari desa. Sehingga berdampak pada ketidak tepatan sasaran dalam pendistribusian bantuan, yang mana keluarga dengan kategori mampu dapat masuk dalam data penerima bantuan sedangkan keluarga dengan kategori tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Menyikapi hal tersebut upaya penyelesaian masalah yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan ialah dengan kebijakan terasi Kementerian Sosial yang mengamanatkan bahwa pihak desa bebas dan dapat menghapus data yang tidak sesuai sebagai penerima bantuan PKH. *Controlling* dalam penyesuaian data kependudukan sesuai dengan kriteria penerima bantuan ini dapat dilakukan penghapusannya setiap bulan. Yang artinya *Controlling* data kependudukan dilakukan secara rutin melalui aplikasi Sikgn dengan melibatkan Operator Desa.

Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan oleh para pendamping PKH ialah lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana daerah jangkauannya membutuhkan waktu tempuh yang lama yaitu sekitar satu jam perjalanan, ditambah lagi dengan medan jalan yang rusak. Selanjutnya ialah ketidak tersediaan sarana dan

prasarana dalam P2K2, sarana dan prasarana yang tersedia dalam program bantuan PKH di dua desa yaitu desa togubang dan tegar priyah memiliki kendala yang sama di bidang sarana dan prasarana dimana tidak ada sarana tertentu dalam menunjang kegiatan sosialisasi.

Dalam mengetahui efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemerataan dan Peningkatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan diukur menggunakan 4 indikator dari (Mulyasa, 2004:120) yakni ketepatan sasaran, tujuan program, sosialisasi program dan pemantauan program.

a. Ketepatan Sasaran

Berdasarkan wawancara yang dikatan oleh Bapak suakrdi selaku Kepala Sub Bagian Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dan penerima PKH warga desa Tegar Priyah Ibu Rodiyeh diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Tobubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan belum tepat sasaran seperti yang diungkapkan oleh Bapak Selaku Kepala Sub Bagian Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan yang selasas dengan penuturan warga Pemeriman Manfaat PKH yang mana dalam pengimplementasiannya masih banyak warga dengan kategori layak mendapatkan bantuan PKH namun mereka tidak terdaftar dan tidak mendapat bantuan sedangkan untuk warga yang memiliki klasifikasi tidak memedai sebagai penerima PKH malah menerima bantuan PKH.

b. Sosialisasi Program

Sosialisai merupakan bentuk komunikasi yang dijalankan oleh agen pelaksana PKH kepada penerima manfaat PKH. Korespondensi merupakan cara pelaksanaan program yang bermanfaat, sesuai dengan Van Mater dan Van Horn (Tacjhan, 2006) dimana korespondensi merupakan sistem yang kuat dalam menjalankan strategi terbuka. Semakin baik komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam suatu siklus pelaksanaan, maka dugaan bahwa kesalahan akan semakin kecil terjadi, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa adanya sosiaslisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH tidak serta – merta di ketahui oleh kelompok penerima manfaat PKH, yang mana di buktikan banyak warga

yang beranggapan bahwa tidak ada sosialisasi PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH namun dari penuturan tersebut terdapat warga yang mneyatakan bahwa dirinya ikut dan memahami setiap informasi yang disampaikan oleh pendamping PKH.sehingga penyebaran informasi tidak dapat meresap dan merata kepada semua penerima KPM.

c. Tujuan Program

Tujuan PKH ialah untuk memutus rantai kemiskinan dengan adanaya tujuan dari program PKH sesuai dengan hipotesis Van Mater dan Van Horn (Tacjhan, 2006). dimana dalam suatu program strategi penyajian pelaksanaan strategi dapat diperkirakan tingkat kemajuannya jika dan dengan ketentuan bahwa ukuran dan tujuan pengaturannya masuk akal dengan sosio-kultural yang ada pada tingkat pelaksanaan pendekatan tersebut. Apabila ukuran strategi atau tujuan strategi terlalu besar (bahkan terlalu idealis) untuk dapat dilaksanakan di tingkat masyarakat, maka sangat sulit untuk mengakui pendekatan masyarakat sampai pada titik di mana pendekatan tersebut cenderung dianggap akan mencapai keberhasilan jangka panjang. Senada dengan itu, Mulyadi (2015:12) mengatakan bahwa eksekusi mengacu pada kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu pilihan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa tujuan program bantuan PKH tidak sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan pada masyarakat Kabupaten Bangkalan Khususnya Pada Desa Togubang dan Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan hal ini dikarenakan penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan serta mendongkrak taraf hidup masyarakat bukan hanya dipenaruhi oleh adanya unsur bantuan saja. Ditamah lagi Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang mempunyai rating tingkat kemiskinan tinggi di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan sulitnya mencapai pemakmuran rakyat dengan mengedapankan Program Bantuan PKH. Ditambah lagi situ asi dan kondidi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kmemungkinkan dimana pendataan KPM yang terhambat oleh pemilihan kepala desa yang memanass akibatkan menghambat pendataan Dinas Sosial maupun BPS melakukan survei lapangan dimana dampaknya ada tiga desa

di Kabupaten Bangkalan tidak dapat terdata.

d. Pemantauan Program

Pemantauan merupakan penilaian awal dari implementasi program PKH yang berkaitan bagaimana interaksi program berjalan dan sejauh mana target program telah tercapai. Model eksekusi pendekatan Van Mater dan Van Horn (Tacjhan, 2006) mengartikan bahwa strategi yang dilakukan bukanlah merupakan dampak dari rencana penduduk sekitar yang sangat paham dengan permasalahan dan permasalahan yang mereka alami. Meskipun demikian, strategi yang akan dijalankan oleh pelaksana adalah pendekatan “*top down*” yang mana dengan mempertimbangkan semua hal, para pemimpin tidak mempunyai gambaran yang jelas (dan bahkan tidak layak untuk dihubungi) mengenai persyaratan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh para pemangku kepentingan.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memantau pelaksanaan PKH ialah dengan melakukan sampling pertemuan kelompok yaitu dengan melakukan pengamatan dari penerima pkh itu yang melakukan pencairan pkh itu yang cair berapa dan tidak cair berapa namun dalam pengambilan sampling ini mengalami kendala keterbatasan yakni Dinas Sosial tidak dapat memenuhi pengambilan titik sampling sehingga banyak desa yang tertinggal untuk di data.

Kesimpulan

Dari paparan hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa pelaksanaan PKH untuk mengatasi kemiskinan di Desa Tobubang dan Tegar Priyah Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan baik, terlihat dengan jumlah anggota penerima PKH yang graduasi. Serta penelaahan faktor pendorong yang didapat adalah sumber daya finansial, karakteristik pendamping dan lingkungan sosil ekonomi, sedangkan faktor penghambat berupa tidak sinkronnya informasi kependudukan dan wilayah penerima manfaat PKH yang sulit dijangkau. Sementara itu, penilaian kelayakan Program Keluarga Harapan dipusatkan pada 4 petunjuk indikator dari (Budiani, 2007:53) yaitu ketepatan tujuan, sosialisasi program, sasaran dan pengawasan program. Yang mana dari keempat penanda tersebut bisa dikatakan belum terpenuhi, sehingga dinilai PKH belum benar-benar siap untuk memusnahkan kemiskinan 100 persen di Kabupaten Bangkalan.

Saran

Saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi serta masukan baik untuk peningkatan pengayaan teori maupun pengangkatan permasalahan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan guna mendukung pelaksanaan program ialah sebagai berikut :

1. Perlu adanya evaluasi berkala dari pemaparan data penerima bantuan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan pertriwulan atau 3 bulan yang dilakukan oleh Pendamping PKH Desa Tegar Priyah dan Desa Togubang hingga Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan agar validitas data dan sinkronitas data tetap terjaga.
2. Perlu adanya *call center* pada semua perangkat daerah yang terlibat untuk menerima aduan graduasi sehingga terjadi pembaharuan data – data penerima bantuan PKH untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
3. Perlu adanya perbaikan fasilitas publik khususnya jalan raya Kabupaten Bangkalan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar memudahkan kinerja para Pendamping PKH Desa Togubang dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dalam menjangkau sasaran aau penerima bantuan PKH untuk melakukan pendampingan.
4. Perlu disediakannya sarana dan prasarana sosialisasi P2K2 seperti penyediaan layar proyektor dan penyediaan kursi sebagai bentuk sarana pendukung dalam memudahkan penyampaian sosialisasi kepada para penerima bantuan PKH.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2003). *Prosedur penelitian dan Studi Kasus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Effendy. (1993). *Human Relations dan Publik Relations*. Bandung: Mandar Maju.
- Khosman, A., Dharmawan, A. H., Saharuddin, Alifiasari, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jawa Tengah: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity Qualitative Research Vol.1*. California: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No.1*
- Siagian. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method Edisi Ke dua*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tampubolon, M. (2020). Efektivitas Kepemimpinan Dalam Suatu Organisasi. *Majalah Ilmu Politeknik Mandiri Bina Prestasi* , 11-19.
- Taufiqurakhman. (Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan). 2014. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Usman, H. (1996). *Metode Penelitian Sosial* . Jakarta: Bumi Aksara.